



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA): STUDI KASUS DI BNN PROVINSI JAWA TIMUR

Salva Bening Mulyaningtias

salvabening@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract

This research is motivated by the rampant cases of drug abuse in East Java, especially in rural areas. Seeing the high frequency of these cases, the East Java Province National Narcotics Agency launched the Desa Bersinar (Clean from Drugs) program as an effort to empower the community in building community resilience from the threat of drugs. The purpose of this study was to determine the form of community empowerment carried out in the Desa Bersinar program as well as the impacts and challenges faced during the implementation of the program. The approach used in this study is descriptive qualitative with primary data sources through interviews during internships and secondary data in the form of program implementation documents. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that community empowerment efforts in the program are carried out through soft skills training, family and adolescent resilience, technical guidance for anti-drug activists, active community involvement in social activities and premarital counseling and integrated health posts. Through this program, the East Java Province National Narcotics Agency has succeeded in increasing public awareness, strengthening relationships between families and encouraging active community participation in preventing drug abuse. However, challenges such as limited budget, instant mentality of the community, gratification issues, lack of commitment of village heads and communities and unsustainable training results are obstacles in optimizing the implementation of the program. Theoretically, this program supports the restoration of social functions of the community as studied in the perspective of Talcott Parsons' structural functionalism, although the sustainability of this program still depends on the synergy of various cross-sectors and sustainable social change.

Keywords: *Community Empowerment, Desa Bersinar Program, Prevention Of Drug Abuse.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam tananan sosial di Indonesia. Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Hal ini didasari oleh faktor letak geografis yang dinilai strategis, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi hingga keberagaman sosial ekonomi yang menjadikan Provinsi Jawa timur menjadi daerah yang rentan terhadap sasaran pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyebaran ini bahkan tidak hanya lagi menyasar pada wilayah perkotaan tetapi juga merambat ke wilayah pedesaan yang sebelumnya dianggap relatif tidak terjangkau.

Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, Jawa timur juga merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia yang memiliki tingkat tinggi kedua terhadap kerawanan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa daerah seperti Surabaya, Sidoarjo

hingga Madura menjadi pusat yang disebut sebagai kawasan yang rawan terjadi pengedaran gelap narkoba (20041010049.-Bab1, n.d.). Masalah ini menjadi lebih miris ketika pengguna narkoba bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi juga merambat ke kalangan remaja dan anak-anak. Tentunya hal ini menjadi mengkhawatirkan mengingat bahwa generasi muda merupakan aset bangsa dikemudian hari.

Keterlibatan oknum seperti kepala desa dan masyarakat setempat dalam jejaring pengedaran narkoba juga dapat memperparah upaya penanggulangan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan strategi yang bukan hanya represif seperti dari aspek hukum tetapi juga melalui fokus sosial yang mampu menjangkau akar permasalahan dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

Salah satu fokus yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam upaya tersebut adalah melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Program ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang merujuk pada pentingnya peran dan partisipasi masyarakat terlebih lagi di tingkat desa (Safitri et al., 2024a) dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Program desa bersinar ini menjadi program berbasis komunitas yang menjadi ruang intervensi sosial untuk membentengi desa dari pengaruh peredaran gelap narkoba. Selain itu juga program ini memiliki tujuan untuk nantinya dapat memberdayakan mantan penyalahguna serta memperbaiki stigma buruk mereka di masyarakat.

Program Desa Bersinar yang dijalankan oleh BNNP Jawa Timur ini juga menggandeng pemerintah, perangkat desa serta unsur masyarakat lainnya dalam pelaksanaannya. Program ini mencakup desiminasi informasi, pembentukan tim pokja, penyuluhan pranikah, test urine mandiri, pelatihan ketahanan keluarga hingga pelatihan softskill untuk para mantan penyalahguna maupun masyarakat umum. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari efek narkoba serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi agar tidak lagi terjerumus pada tindakan penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkoba.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menjadi acuan dari program ini dalam pelaksanaannya. Desa tidak hanya menjadi objek pelaksanaan dari program ini tetapi juga menjadi subjek yang dapat berperan aktif dalam proses berlangsungnya kegiatan. Masyarakat diberdayakan melalui pelatihan softskill seperti pelatihan menjadi barista, mencetak sablon, servis AC, perakitan kerajinan laut hingga pembuatan minuman untuk meningkatkan usaha UMKM. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini terdapat pula program ketahanan keluarga yang melibatkan orang tua dan anak dalam upaya memperkuat komunikasi dan ikatan antar keluarga sebagai upaya preventif dari lingkup masyarakat terkecil.

Meskipun program yang dijalankan oleh BNNP Jatim ini terlihat sangat visioner tentunya tetap tidak akan lepas dari tantangan dan hambatan. Akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi di awal tahun 2025 turut serta memberikan dampak terhadap pelaksanaannya. Beberapa kegiatan fundamental seperti pelatihan dan pembentukan agen pemulihan (rehabilitasi) terpaksa tidak dapat dilanjutkan. Disisi lain, masih banyak pula desa yang menolak ketika pihak BNNP Jatim ingin melaksanakan programnya disana dengan alasan khawatir dicap sebagai “daerah narkoba” hingga kasus gratifikasi dan permintaan intersif. Dari hal ini diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan penyediaan sarana pelatihan tetapi juga sangat erat hubungannya dengan mentalitas dan komitmen dari pemerintah desa dan stakeholder terkait.

Melihat dinamika dan kompleksitas pelaksanaan program tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk dinamika pemberdayaan masyarakat

dalam program desa bersinar yang dilaksanakan oleh BNNP Jatim selama kurang lebih 6 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana proses pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi permasalahan narkoba. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi terhadap pemberdayaan berbasis komunitas yang dilakukan oleh pemerintah berbasis penanggulangan narkoba.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori fungsionalisme struktural talcott parsons untuk memahami bagaimana pelaksanaan program Desa Bersinar dari sudut pandang sosiologis. Fokus utama dari kajian ini yakni bagaimana masyarakat desa sebagai bagian dari sistem sosial mampu menjalankan fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency) melalui keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis maupun teoretis dalam pengembangan program berbasis masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada konteks sosial pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program desa bersinar oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan ini penulis berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap proses, pola serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha memahami realitas sosial secara menyeluruh berdasarkan perspektif informan. Fokus dari penelitian ini yakni bentuk, strategi dan dinamika pemberdayaan masyarakat khususnya pada keterlibatan masyarakat desa sebagai subjek aktif dalam program tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staff BNN Provinsi Jawa Timur yang terlibat langsung dengan program tersebut serta observasi non partisipatif selama penulis melakukan kegiatan magang di instansi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan bentuk tertentu seperti pemberdayaan, partisipasi warga serta hambatan program yang dialami. Melalui pendekatan ini maka penulis berharap penelitian ini mampu menjelaskan praktik pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi sosial berbasis komunitas dalam menolak ancaman narkoba di ranah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Desa Bersinar

Program desa bersinar yang diinisiasi oleh BNN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya ikut serta menggunakan berbagai strategi pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba. (Widi Sutanta & Luthfi Ashsyarofi, n.d.) Strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya pun bukan hanya sebatas sosialisasi satu arah tetapi juga mengarah pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang bersifat aktif dan aplikatif. Dalam program ini juga melibatkan mantan penyalahguna narkoba pada pelatihan ketrampilan /softskill .

Bentuk pelatihan softskill yang telah terlaksana selama program desa bersinar ini diantaranya adalah pelatihan servis AC, pelatihan barista, pelatihan pembuatan sablon hingga merancang kerang-kerangan untuk digunakan sebagai souvenir khas daerah mereka untuk menunjang UMKM setempat. Pelatihan ini ditujukan agar masyarakat memiliki alternatif sumber penghidupan yang legal, produktif dan mandiri secara ekonomi. Pada teknis pelaksanaan pelatihannya BNN mendatangkan instruktur yang ahli dibidangnya.

Terlepas dari semua itu, pelaksanaan program ini juga mengalami beberapa hambatan dan tantangan. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu staff BNN Provinsi Jawa Timur, “kebanyakan dari mereka setelah pelatihan beres, maka beres juga tanggungan mereka buat ngelanjutin programnya”. alasan ini juga menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat bermental instan sehingga kenyataan dilapangan hanya 3 dari 10 peserta yang melanjutkan pelatihan tersebut sebagai bekal mereka bekerja.

Alasan lain juga dilontarkan dengan alasan keterbatasan modal. Padahal pihak BNN Provinsi Jawa Timur juga sudah melakukan kerjasama dengan dinas koperasi maupun dinas perdagangan untuk memberikan tambahan modal. Dari hal ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat tergolong kurang sehingga keberlanjutan manfaat dari program ini tidak dapat dirasakan secara maksimal. Program pemberdayaan juga dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian masyarakat tanpa bergantung pada bantuan eksternal.

Selain pelatihan softskill untuk melatih kemandirian ekonomi, pemberdayaan juga diarahkan ke ranah sosial dan psikologis. Program ini berupa pelatihan ketahanan keluarga dan ketahanan remaja yang menyasar keluarga dan remaja usia sekolah yang dianggap rentan terhadap pengaruh buruk narkoba. Teknis pelatihan ketahanan keluarga dilakukan dengan menunjuk 10 keluarga didesa tersebut yang dihadiri oleh masing-masing satu kepala keluarga dan satu anak yang kemudian diberi pelatihan berupa komunikasi aktif dalam keluarga hingga strategi menghindari pengaruh dari lingkungan negatif.

Beberapa orang tua yang menjadi peserta mengaku mengalami komunikasi yang lebih baik dengan anak mereka dan begitu pula anak mereka juga merasakan kedekatan dengan orang tuanya. Selain itu, mereka juga merasa lebih didengar dan dimengerti. Pendekatan berbasis keluarga ini juga dinilai menyasar pada akar masalah sosial dalam keluarga (3443-Article Text-12869-1-10-20220419, n.d.) sehingga pelatihan ini tidak hanya menjadi upaya pencegahan tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial dalam keluarga sehingga nantinya dapat terbentuk sistem dukungan internal yang lebih kuat.

Program ini juga melibatkan bimbingan teknis untuk membentuk penggiat anti narkoba yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba hingga diseminasi informasi. Para penggiat ini yang nantinya menjadi perpanjangan tangan dari BNN untuk mengorganisir kegiatan secara lokal. Selain itu desa juga dihimbau dapat mengadakan kegiatan test urine mandiri sebagai bentuk pencegahan dengan frekuensi waktu acak misal setahun sekali.

Usaha BNN dalam memberdayakan masyarakat juga dilakukan dengan bekerjasama bersama karang taruna dalam kegiatan seni dan olahraga, mengadakan penyuluhan pendampingan pranikah dengan membekali bagaimana efek samping penyalahgunaan narkoba jika dilakukan di dalam rumah tangga hingga pemberian informasi di posyandu perihal dampak buruk ibu hamil apabila mengonsumsi narkoba. Selain usaha yang mengarah kepada edukasi masyarakat, BNN Provinsi jatim juga memasang spanduk atau stiker yang mudah dilihat masyarakat seperti di rumah-rumah, tempat kos, warung kopi juga toko kosong untuk menjangkau tempat-tempat rawan penyalahgunaan narkoba.

Dengan beragamnya bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam program desa bersinar tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat teknis tetpi juga dapat menjangkau aspek sosial, psikologis dan budaya masyarakat desa. Meskipun dinilai masih mengalami beberapa hambatan dan kendala, program ini telah berhasil membuka ruang partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial anti narkoba di ranah desa.

b. Tujuan dan Dampak Pelaksanaan Program Desa Bersinar

Desa merupakan kelompok terkecil dari sistem pemerintahan yang dimana masyarakatnya tentu memiliki kekuatan dan keeratan untuk menjaga lingkungan sekitar mereka (Hamdan Khidir Bilyan, 2014) sehingga program ini diharapkan dapat menjadi benteng ketahanan bagi keluarga mereka maupun dapat pula meningkatkan ketahanan remaja anti narkoba. Program desa bersinar memiliki tujuan utama untuk menciptakan masyarakat agar memiliki ketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Program ini diinisiasi juga untuk dapat membentuk sinegritas dan kolaborasi antar pemerintah daerah dengan stakeholder terkait (Sari et al., 2023). Menurut hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa apabila suatu desa mampu menjaga lingkungan sekitar dari bahaya narkoba maka ditingkat kecamatan serta kabupaten/kota pula diharapkan sudah otomatis terbentengi dari bahaya-bahaya narkoba.

Program ini juga dirancang agar warga tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga sebagai subjek yang dapat terlibat aktif dalam proses pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di wilayah masing-masing sehingga dapat terwujudnya ekosistem yang lebih tanggap dan berdaya dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan masyarakat juga satu visi dengan pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Apabila dalam desa tersebut masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahayanya maka dapat dipastikan mereka akan aktif pula memasang sarana informasi dan peringatan di lingkungan masing-masing. Bagi oknum yang memiliki tujuan menyebarkan dan menyalahgunakan narkoba secara tidak langsung akan merasa segan pula.

Pelaksanaan program desa bersinar juga memiliki tujuan agar masyarakat berani melapor jika terjadi kasus penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba kepada BNN maupun kepada pihak berwenang yang lain. Selain itu juga, program ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa korban penyalahguna wajib di rehabilitasi tanpa adanya proses hukum (Puluhulawa & Nggilu, 2021). Berdasarkan wawancara dengan salah satu staff yang terjun langsung dalam pelaksanaan program ini kebanyakan dari mereka akan menjaga keluarganya jika terbukti menyalahgunakan. Tetapi ketika sudah tertangkap, mereka akan mati-matian mengeluarkan uang agar informasinya dapat tertutup. Padahal pada kenyataannya, proses rehabilitasi sebenarnya tidak dipungut biaya sepeserpun jika mereka hanya sebatas rawat jalan.

Jika berbicara dampak dari pelaksanaan program ini, maka tentunya sangat dirasakan masyarakat seperti meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan sosial dari pengaruh narkoba, hingga meningkatnya bonding antar orang tua dan anak. Melalui program ketahanan keluarga, orang tua mengaku lebih memahami serta terbuka terhadap kebutuhan dan aktivitas anak mereka. Anak juga merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam keluarga mulai mengalami pergeseran ke arah yang lebih sehat dan suportif

Berdasarkan pemaparan terkait tujuan dan dampak tersebut, program desa bersinar memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menumbuhkan ketahanan sosial anti narkoba. Meski mengalami kendala, upaya dengan melibatkan masyarakat setempat dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan narkoba terutama di daerah-daerah rawan.

c. Tantangan dan Kelemahan Program Desa Bersinar

Dalam pelaksanaan program desa bersinar tentunya memiliki sejumlah dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa implemmentasi program ini sebenarnya juga menghadapi tantangan dan hambatan yang signifikan. Salah satu bentuk tantangan dan hambatan tersebut seperti

masyarakat masih memelihara pola pikir instan yang kuat terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam distribusi gelap narkoba. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa menjadi kurir lebih menghasilkan keuntungan yang besar dan instan dari pada bekerja dari hasil pelatihan softskill yang telah dijalani.

Dari realitas tersebut menunjukkan bahwa isu mentalitas menjadi penghalang besar bagi program pemberdayaan karena program ini sesungguhnya membutuhkan proses, komitmen serta perubahan pola pikir. Sedangkan mereka berpikir bahwa ketika hasil tidak datang secara instan maka kebanyakan akan kehilangan motivasi dan kembali lagi ke pola lama (Helviza & Mukmin, 2016). Maka dari itu, jika dilakukan dengan pendekatan ini maka upaya pencegahan dirasa tidak akan cukup kuat jika tidak diimbangi dengan penguatan karakter dan perubahan pola pikir yang kuat.

Kendala yang lain juga datang dari keterbatasan anggaran. Berdasarkan informasi dari staff BNN Provinsi Jatim, akibat efisiensi anggaran di tahun 2025 maka kegiatan pelatihan softskill dan pembentukan agen pemulihan akan ditiadakan. Padahal menurut mereka, dua program ini merupakan komponen utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta dinilai dapat memberikan alternatif kegiatan yang produktif. Keterbatasan anggaran ini menimbulkan risiko dalam konsistensi dan semangat masyarakat untuk tetap aktif dalam pelaksanaan program (Kasus et al., n.d.).

Keberlanjutan hasil pelatihan program tersebut juga sebenarnya menjadi persoalan. Banyak peserta yang tidak melanjutkan hasil dari pelatihan tersebut akibat tidak adanya sistem pendampingan dan monitoring pasca kegiatan. Keterampilan tersebut pada akhirnya tidak dapat dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Sehingga potensi pemberdayaan menjadi kurang maksimal dan cenderung terhenti pada tataran kegiatan simbolik.

Selain itu, kendala komitmen dari kepala desa juga menjadi permasalahan. Tidak semua kepala desa berkenan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Desa Bersinar tersebut. Bahkan beberapa dari mereka menolak karena merasa terbebani dan terancam. Seperti halnya di Madura dimana Klebun (sebutan kepala desa disana) menolak ajakan kerjasama karena ia pun juga berafiliasi dengan para bandar. Jika masyarakat setempat mengetahui hal tersebut maka mereka akan merasa terancam aktivitasnya sehingga akan terjadi perlawanan. Disisi lain, klebun juga merasa tidak mampu berdiri sendiri dan membutuhkan kontribusi dari masyarakat setempat sehingga otomatis mereka akan menolak berkomitmen atas pelaksanaan program tersebut..

Kasus gratifikasi juga seringkali terjadi pada perangkat desa setempat. Seperti halnya di salah satu desa di Kabupaten Jombang yang keberatan berkomitmen atas terselenggaranya program ini. Tetapi dari pihak bakesbangpol setempat tetap berkeinginan agar program dilaksanakan di daerah tersebut. Alhasil terjadilah kasus gratifikasi seperti kepala desa meminta jatah upah atas terselenggaranya program padahal upah hanya diberikan untuk peserta. Bahkan pihak kepala desa juga mengambil jatah uang kebersihan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak terdistribusikan uang tersebut sebagai hak mereka.

Minimnya antusias masyarakat serta keterlibatan pemerintah setempat juga menjadi permasalahan yang sering kali dialami pihak BNN Provinsi Jatim dalam pelaksanaan program ini. Beberapa masyarakat beralasan sibuk dengan kepentingan masing masing sehingga enggan mengikuti pelaksanaan program tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program Desa Bersinar telah diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat tetapi tingkat keberhasilannya tentu sangat bergantung pada keberlanjutan serta dukungan dari seluruh aspek masyarakat yang terlibat

Program Desa Bersinar Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural

Perspektif teori fungsionalisme struktural memandang bahwa masyarakat sebagai sistem sosial yang memiliki masing-masing bagian untuk saling menjaga keseimbangan satu sama lain dengan tujuan mencapai stabilitas (A. Shofiyyudin, n.d.). Dalam hal tersebut, program desa bersinar di ibaratkan sebagai bentuk mekanisme sosial yang memulihkan fungsi-fungsi sosial yang terganggu akibat kasus penyalahgunaan narkoba pada masyarakat desa.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini, fungsi adaptasi (adaptation) tercermin dengan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan softskill, sosialisasi serta keterlibatan secara langsung dalam upaya memerangi bahaya narkoba. Dengan dibekali pelatihan ketrampilan alternatif, masyarakat memiliki opsi untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan tanpa bergantung pada aktifitas ekonomi yang ilegal. Melalui adaptasi ini, masyarakat menunjukkan bagaimana respon mereka ketika kelak menghadapi persoalan ancaman bahaya narkoba di lingkungannya.

Fungsi pencapaian tujuan (Goal Attainment) tercermin dalam usaha berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yakni mencapai desa bersih narkoba. Adanya komitmen dari setiap elemen masyarakat dalam keberlangsungan dan keberlanjutan program ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki satu visi dan tujuan dalam mewujudkan tujuan bersama. Komitmen seperti mengikuti seluruh rentetan program dari awal hingga akhir sampai menumbuhkan kemandirian desa dalam upaya mempertahankan desa yang bersih narkoba menjadi langkah yang konkrit dalam mencapai tujuan kolektif tersebut. Melalui program ini, warga mulai memahami bahwa pencapaian visi tersebut bukan hanya tugas dari BNN tetapi juga tanggung jawab bersama bagi seluruh elemen masyarakat desa.

Fungsi Integrasi (Integration) juga tercermin melalui kegiatan sosial seperti karang taruna, rapat RT, pengajian ibu-ibu Fatmahan dsb. melalui forum ini, masyarakat dapat menciptakan ruang diskusi serta memupuk solidaritas sosial sebagai bekal dalam membangun rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Fungsi pemeliharaan pola (Latency) yakni fungsi yang berkaitan dengan nilai dan norma masyarakat. Program desa bersinar ini berupaya untuk menanamkan pola hidup sehat anti narkoba serta memperkuat pola hubungan antar anggota keluarga. Melalui kegiatan dalam program desa bersinar seperti ketahanan keluarga, ketahanan remaja, penyuluhan pranikah dan posyandu, nilai-nilai tidak hanya diajarkan tetapi juga ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari. Melalui proses ini akan tertanam proses sosial dari dalam yang kuat. Selain itu, program ini menanamkan tentang pentingnya ketahanan terhadap ancaman narkoba yang tidak hanya bersifat pragmatis tetapi juga mengakar pada budaya lokal.

Dari perspektif teori fungsionalisme struktural dapat dilihat bahwa program desa bersinar memiliki peran penting dalam menanamkan kembali fungsi sosial dalam masyarakat desa. Dilihat dari teori ini maka program desa bersinar sejatinya telah mampu menyentuh seluruh aspek fungsional dasar masyarakat meskipun sedikit mengalami hambatan serta masih memerlukan tingkat optimalisasi yang lebih kuat. (Faradilla Aini n.d.) Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan, efek jangka panjang program ini tentunya sangat membutuhkan konsistensi dan partisipasi aktif masyarakat juga dukungan dari pemerintah terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa program desa bersinar BNN Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk usaha pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan anti narkoba di kalangan masyarakat desa. Dalam

pelaksanaanya, program ini mengintegrasikan berbagai strategi seperti pelatihan ketahanan keluarga dan remaja, pelatihan softskill, bimtek penggiat anti narkoba, penyuluhan pranikah dan posyandu hingga keterlibatan aktif masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempererat komunikasi antar keluarga. Selain itu program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam upaya pencegahan narkoba. Meskipun demikian, dalam pelaksanaanya, program ini pun tetap mengalami tantangan seperti mental instan masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya komitmen pemerintah desa hingga ketidakberlanjutan hasil pelatihan.

Jika ditinjau dari perspektif teori fungsionalisme struktural, pelaksanaan program desa bersinar telah memenuhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola dalam masyarakat desa. Kendati demikian, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak yang terkait. Program desa Bersinar juga telah membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk pendekatan yang berpotensi besar untuk membangun ketahanan anti narkoba. Namun berhasil tidaknya tentu sangat bergantung pada komitmen serta keterlibatan seluruh aspek masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

20041010049.-bab1. (n.d.).

3443-Article Text-12869-1-10-20220419. (n.d.).

Ansar Firman, A., Jenderal Perimbangan Keuangan, D., & Keuangan, K. R. (2021). Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BERBASIS KOMUNITAS. Jurnal Tata Sejuta, 7(1). <http://ejurnalstiamataram.ac.id>

Dewi Suryani. (n.d.).

Endah, K. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: MENGGALI POTENSI LOKAL DESA. Jurnal MODERAT, 6(1).

Hamdan Khidir Bilyan, M. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa.

Helviza, I., & Mukmin, Z. (2016). KENDALA-KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH. In Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah (Vol. 1, Issue 1).

jis_vyl,+Milyana+Sanger. (n.d.).

Kasus, S., Karangtengah, D., Baturaden, K., & Judul, H. (n.d.). KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM DESA BERSIH DARI NARKOTIKA (DESA BERSINAR) DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAS} LAH} AH SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh CITRA FITRIA DEWI HARISTA NIM. 1917303038 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2023.

Kota, D. I., & Aceh, B. (n.d.). EFEKTIVITAS PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA.

Masyarakat, P., Kegiatan, D., Masyarakat, P., & Desa, D. I. (n.d.). 72 Dwi Iriani Margayaningsih, P eran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

Memahami Strukur Sosial Keluarga di Yogyakarta. (n.d.).

Oleh. (n.d.). LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PERCEPATAN DESA BERGERAK BERBASIS TRANSFORMASI DIGITAL MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL.

Prayitno, U. Singgih. (2013). Pemberdayaan masyarakat. P3DI Setjen DPR, Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Puluhulawa, M. R., & Nggilu, N. M. (2021). Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. In Jurnal DAS SEIN (Vol. 1, Issue 2). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/>

- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4483>
- Safitri, L., Vero Herivo, M., Nadhiroh, V. A., Fathurrahman, M. D., Faundria, I. N., Zidan, A., Rohman, A., & Faiq, M. (2024a). Strategi Implementasi Program Desa Bersinar dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba: Studi Kasus di Desa Ringinarum, Kabupaten Kendal Strategy for Implementing the Shining Village Program in Handling Drug Red Zone Villages: Case Study in Ringinarum Village, Kendal Regency. *Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 3, 20–33. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i3.476>
- Safitri, L., Vero Herivo, M., Nadhiroh, V. A., Fathurrahman, M. D., Faundria, I. N., Zidan, A., Rohman, A., & Faiq, M. (2024b). Strategi Implementasi Program Desa Bersinar dalam Penanganan Desa Zona Merah Narkoba: Studi Kasus di Desa Ringinarum, Kabupaten Kendal Strategy for Implementing the Shining Village Program in Handling Drug Red Zone Villages: Case Study in Ringinarum Village, Kendal Regency. *Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 3, 20–33. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v1i3.476>
- Sari, R., Tinggi, S., Amuntai, I. A., Hulu, K., Utara, S., & Selatan, K. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN KOLABORATIF PADA PROGRAM BERSIH NARKOBA (DESA BERSINAR) DI KABUPATEN BALANGAN. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5).
- Widi Sutanta, A., & Luthfi Ashsyarofi, H. (n.d.). Aditya Widi Sutanta ç9011 IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERSINAR DALAM PENEKANAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU). <https://sukabumikab.bnn.go.id/apa-itu-desa-bersinar/>